



JAKK - UHO

JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
(JAKK-UHO)

Vol. 5 /No. 1 /Bulan April Tahun 2024
e-ISSN: 2797-6831

EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI DI KLINIK PRATAMA SWASTA
DI KOTA KENDARI TAHUN 2022

Salsa Dwi Ramadhani¹, Jafriati², Listy Handayani^{3*}

¹²³Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo
salsadwiramadhani101200@gmail.com¹, jafriati.jazuli@gmail.com², listyhandayani@uho.ac.id³

INFO ARTIKEL

Kata kunci: Klinik Pratama,
Evaluasi, Administrasi

***Korespondensi:**

Listy Handayani
Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Halu Oleo
Kampus Hijau Bumi Tridharma
Anduonohu, Jl. H.E.A Mokodompit,
Kendari
Email: listyhandayani@uho.ac.id

Copyright: © 2016 Author et al. This is an open access article distributed under the terms of the [JAKK-UHO Attribution License](http://ojs.uho.ac.id/index.php/jakk-uho), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan (JAKK-UHO)
Published by Universitas Halu Oleo

Laman:

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/jakk-uho>

Kode Etik: -

Abstrak

Latar Belakang: Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang dilayani oleh dokter umum dan pimpinan oleh seorang dokter umum. Klinik Fonaselab merupakan Klinik pelayanan kesehatan terpadu dan Klinik BNNP Sultra merupakan Klinik pratama di Kota Kendari. Hasil studi pendahuluan ditemukan adanya beberapa kendala dalam kegiatan administrasi pada klinik tersebut.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan administrasi dari aspek sarana prasarana, ketersediaan SDM Kesehatan dan non Kesehatan, pelatihan dan pelaporan di Klinik Pratama di Kota Kendari.

Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi di Klinik Pratama di Kota Kendari. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada 2 informan kunci dan 4 informan pendukung yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil: Evaluasi administrasi di klinik pratama Fonaselab berdasarkan aspek sarana, ketersediaan SDM Kesehatan dan tenaga administrasi telah sesuai dengan persyaratan klinik yang termuat dalam Permenkes RI. Selain itu, tenaga administrasi juga telah mengikuti pelatihan. Namun, terdapat kendala ketersediaan prasarana berupa laptop/computer yang sangat berguna dalam proses pelaksanaan administrasi. Sedangkan di Klinik BNNP Sultra, dari aspek sarana sudah sesuai dengan Permenkes RI tentang klinik. Tenaga administrasi juga telah mengikuti pelatihan. Namun dari aspek ketersediaan SDM Kesehatan dan tenaga administrasi belum memadai. Dalam hal pelaporan ke Dinas Kesehatan tidak ada kendala. Kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan sudah terlaksana dengan baik.

Kesimpulan: Proses administrasi di Klinik Pratama Fonaselab dari aspek sarana, SDM, pelatihan dan pelaporan sudah cukup baik. Demikian pula di Klinik Pratama BNNP, namun dari segi jumlah SDM Kesehatan dan non Kesehatan masih perlu ditingkatkan. Pada kedua klinik tersebut, terdapat keterbatasan computer/laptop yang sangat dibutuhkan dalam proses pelayanan administrasi kesehatan.

Abstract

Background: Pratama Clinic provides basic medical services served and led by a general practitioner. The Fonaselab Clinic and the BNNP Sultra Clinic are the pratama clinic in Kendari City. The results of the preliminary study found that there were several obstacles in administrative activities at the clinic.

Objective: This study aimed to evaluate the implementation of administration from the aspects of infrastructure, availability of health and non-health human resources, training and reporting at the Pratama Clinic in Kendari City.

Method: A qualitative descriptive was carried out to describe the implementation of administration at the Pratama Clinic in Kendari City. The data collection technique used in-depth interviews with 2 key informants and 4 supporting informants who were selected using a purposive sampling technique.

Results: Evaluation of administration at the Fonaselab Pratama clinic based on aspects of facilities, availability of health human resources and administrative staff are in accordance with the clinical requirements contained in the Indonesian Minister of Health Regulation. Apart from that, administrative staff have also participated in training. However, there are problems with the availability of infrastructure in the form of computers which are very useful in the administration process. Meanwhile, at the Southeast Sulawesi BNNP Clinic, in terms of facilities, it is in accordance with the Indonesian Minister of Health's Regulation on clinics. Administrative staff have also attended training. However, in terms of the availability of health human resources and administrative staff, it is inadequate. In terms of reporting to the Health Service there are no obstacles. The completeness and timeliness of reporting has been carried out well and as expected.

Conclusion: The implementation of administration at the Pratama Fonaselab Clinic from the aspects of facilities, human resources, training and reporting is quite good. Meanwhile, the BNNP Sultra Pratama Clinic in terms of facilities, training and reporting are quite good, but in terms of health and non-health human resources, the numbers still need to be increased. In these two clinics, there are still limited computer which is really needed in the health administration service process.

PENDAHULUAN

Perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2011 tentang Klinik, definisi klinik adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Permenkes No. 28, 2011).

Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar yang dilayani oleh dokter umum dan pimpinan oleh seorang dokter umum. Berdasarkan perjanjiannya Klinik ini dapat dimiliki oleh badan usaha ataupun perorangan. Klinik pratama merupakan suatu unit pemeliharaan kesehatan di mana pasien yang berkunjung dapat melakukan konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan berobat dengan dokter yang praktek setiap hari, kecuali hari minggu harus dengan perjanjian dengan dokter terlebih dahulu. Pelayanan kesehatan yang tersedia di Klinik memfokuskan pada penyakit umum (Yustiawan, 2013).

Klinik Pratama sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan harus mempunyai keunggulan kompetitif. dan juga seharusnya mempunyai daya saing dalam hal mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Konsumen yang semakin pandai dan terdidik menyebabkan keinginan dan harapannya terhadap mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat. Pemenuhan harapan konsumen menjadi prioritas utama dalam jasa pelayanan kesehatan. Pemenuhan harapan pasien merupakan kunci kepuasan, yaitu apabila kinerja mutu layanan jasa rumah sakit dan Klinik sesuai dengan harapan, maka pasien akan puas (Sunarto dalam Sandy, 2020).

Dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada pasien, tidak terlepas dari pelayanan administrasi. Administrasi dalam arti yang sempit merupakan suatu kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari kegiatan mencatat, menyurat, pembukuan serta pengarsipan surat dan juga hal

lainnya yang dimaksudkan untuk ketersediaan informasi serta mempermudah untuk memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi dalam arti luas, didefinisikan dengan suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/atau organisasi untuk mengelola sumberdaya termasuk untuk mengatur tata ruang dan tata dokumen di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Administrasi merupakan tindakan yang kooperatif dalam bentuk kegiatan usaha kerjasama antara manusia yang dilakukan secara rasional serta efisien dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Mustofa, dkk., 2020).

Klinik Fonaselab merupakan salah satu Klinik pelayanan kesehatan terpadu yang berada di Kota Kendari. Klinik Fonaselab dikatakan baru karena Klinik ini dibangun pada Tahun 2022. Layanan Kesehatan Klinik Fonaselab terdiri dari: Konsultasi Dokter, konsultasi masalah Kesehatan dan layanan dokter keluarga, layanan kefarmasian, Laboratorium, Fisioterapi, dan pelayanan Kesehatan lainnya. Demikian pula dengan Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP Sultra) juga merupakan klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Umum dan rehabilitasi narkotika yang bernaung dibawah Badan Narkotika Nasional. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan adalah : Pelayanan Klien Lapor Diri/ Sukarela (*Voluntary*); Pelayanan Tersangka Penyalah Guna Narkotika (*Compulsary*); serta pelayanan penyakit umum lainnya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa Klinik Fonaselab relatif baru dan berdiri pada tahun 2022 dan belum dikenal luas oleh masyarakat umum sehingga pada pasiennya masih terbatas dan dalam pelayanan administrasinya belum ditemukan kendala. Sedangkan pada proses pelaksanaan administrasi klinik BNNP Sultra saat ini dikatakan tidak berjalan dengan baik karena adanya kekurangan tenaga sehingga proses administrasinya terhambat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskriptifkan factual dan akurat tentang evaluasi pelaksanaan administrasi di Klinik Pratama Kota Kendari yaitu Klinik Fonaselab dan Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Informan pada penelitian ini terdiri atas 2 informan kunci dan 4 orang informan pendukung yang ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang menggunakan pedoman wawancara dan observasi partisipatif. Data kemudian dianalisis dengan cara *data reduction, data display dan conclusion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan tidak saja mendukung pelayanan yang berkualitas tapi juga akan mengurangi rujukan yang tidak perlu dengan alasan masalah sarana, prasarana dan peralatan Kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2018, sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan (Permenkes No 31, 2018). Berikut pernyataan informan terkait penyediaan sarana dalam mendukung pelaksanaan administrasi di Klinik Pratama Fonaselab dan Klinik BNNP Sultra:

“...bagus, tertata ji sesuai dengan struktual di klinik..”(Ibu D, 22 Tahun, 19 Juli 2023).

“...kalau dalam penyediaan sarana di klinik ini, sa rasa sudahmi tersedia sesuai dengan struktral yang ada di klinik...” (PJ. Klinik. Dr. A, 42 Tahun, 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa sarana dalam pelaksanaan administrasi pada Klinik Fonaselab yang diterapkan yaitu berdasarkan struktural yang ada di Klinik Pratama. Hal ini didukung denah hasil observasi peneliti mengenai sarana dan prasana yang tersedia berupa ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, buku registrasi, pulpen, komputer, laptop, ruang farmasi kamar mandi, ruang pojok ASI, ruang rawat inap, ruang laboratorium dan sarana/prasarana lainnya sesuai kebutuhan. Demikian pula dengan ketersediaan sarana pelaksanaan administrasi di Klinik BNNP Sultra diantaranya ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, buku

registrasi, pulpen, komputer 1, ruang obat, kamar mandi, dan sarana/prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Untuk menunjang pelaksana layanan administrasi di kedua Klinik Pratama tersebut sudah sesuai dengan Permenkes No 09 tahun 2014 mengenai sarana yang harus tersedia di klinik adalah ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi, ruang tindakan, ruang/pojok ASI, kamar mandi/wc, ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, komputer, ruang farmasi, ruang laboratorium, instalasi sanitasi, laptop, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans, sistem gas medis, sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan sarana/prasarana lainnya sesuai kebutuhan (Permenkes No 9 Tahun 2014).

Untuk menunjang pelaksanaan layanan administrasi di Klinik Pratama yaitu sudah sesuai dengan Permenkes No 09 tahun 2014 yang menyatakan bahwa sarana yang ada yaitu ruang pendaftaran/ruang tunggu, komputer, laptop, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi, ruang tindakan, ruang/pojok ASI, kamar mandi/wc, ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, ruang farmasi, ruang laboratorium, instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans, sistem gas medis, sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan sarana/prasarana lainnya sesuai kebutuhan. Setiap Klinik Pratama yang didirikan oleh petugas perorangan atau badan usaha sebelum berjalan atau dikatakan dapat beroperasi harus terlebih dahulu melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan salah satunya tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai (Permenkes No 9, 2014).

Selain sarana, faktor pendukung dalam pelayanan Kesehatan adalah prasarana. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi (Permenkes No 31, 2018). Dalam kegiatan administrasi di Klinik Pratama Fonaselab dan BNNP Sultra masih terdapat kekurangan prasarana, diantaranya adanya keterbatasan computer/laptop pada kedua klinik tersebut. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut:

"...jadi menurut saya untuk penyediaan sarana prasarana di kantor ini, sudah tercukupi, hanya saja mungkin, laptop itu perlu disediakan karna kalau banyak pasien kami kesulitan membantu admin inti untuk merekap data pasien, sedangkan saat ini juga memang ada computer yang tersedia tapi yang bisa digunakan itu hanya satu sedangkan dua nya itu masih rusak dek, jadi memang perlu sekali penambahan laptop di klinik karena itu tadi, kalau pake laptop juga bisa di bawa pulang itu pekerjaan kalau memang tidak selesai dikantor dan deadline nya sudah mepet...." (Ibu N, 29 Tahun, 14 Juli 2023).

"...sebenarnya untuk lebih mengetahui kurangnya sarana itu admin lebih paham dek, tapi sejauh yang saya lihat saat ini mungkin penyediaan laptop di klinik diperlukan karna biasa sa liat itu admin kaya da susah selesaikan pekerjaannya karna da nda bisa bawa pulang itu pekerjaan di rumah, jadi begini kalau seandainya ada laptop tersedia kalau nda selesai itu pekerjaan pasti bisa admin bisa da selesaikan di rumah karna laptop itu dia praktis bisa di bawa kemana-mana sedangkan computer hanya bisa digunakan di kantor saja, itupun dek untuk sekarang hanya satu yang bisa di pakai sedangkan yang lainnya masih rusak...." (PJ. Dr. R, 42 Tahun, 14 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara pada informan untuk Klinik Pratam Fonaselab dan Klinik Pratama BNNP Sultra diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana, terlihat dari penyediaan computer/laptop yang kurang memadai. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan administrasi di Klinik tersebut. Komputer merupakan salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam kegiatan administrasi diantaranya pencatatan, pengelolaan data pasien, serta pelaporan saat ini menggunakan media computer.

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen Kesehatan. Fokus utama manajemen SDM adalah kontribusi pada suksesnya organisasi. Kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan memastikan aktivitas SDM mendukung usaha organisasi yang terfokus pada produktivitas, pelayanan dan kualitas (Kemenkes RI, 2017).

Berikut hasil wawancara mendalam terkait pengertian Pelaksanaan Administrasi Di Klinik Pratama Fonaselab dan Klinik BNNP Sultra seperti yang dijelaskan informan sebagai berikut:
“...SDM nya masing-masing sudah cukup, kan kalau lab dia 2 orang to, terus kalau poli umum juga ada dokternya ada 2, sama perawatnya juga 2, terus kalau poli gigi juga 2, perawatnya 1, ia sesuai ji. Sedangkan bagian administrasi saya dengan ilham, dua orang, emmm cukup...”(Ibu D, 22 Tahun, 19 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara admin dan perawat pada Pelaksanaan Administrasi Di Klinik Pratama Fonaselab, SDM sudah terpenuhi pada masing-masing bidang sesuai dengan Permenkes Klinik Pratama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sumber daya terpenting dalam rangka pelaksanaan administrasi di Klinik Pratama swasta adalah sumber daya manusia. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 28/Menkes/Per/1/2011 tentang Klinik pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (Permenkes No. 28, 2011).

Sedangkan ketersediaan SDM atau tenaga di Klinik Pratama BNNP Sultra belum memadai. Karena hanya terdapat satu dokter untuk Penanggung Jawab Klinik dan 1 orang pelaksana layanan administrasi yang juga memiliki tanggung jawab lain sebagai perawat dan asisten laboratorium sehingga menjadi kendala dalam menyelesaikan semua tanggung jawabnya dan pada beberapa keadaan tertentu jika admin sedang menyelesaikan satu pekerjaannya. Kondisi ini belum sesuai dengan Permenkes No 09 Tahun 2014 pada Pasal (12) yang berbunyi bahwa tenaga medis pada Klinik Pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan (Permenkes No 09, 2014). Selain itu, adanya keterbatasan tenaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi sehingga petugas dipekerjakan juga pada pelayanan lainnya di klinik sehingga terjadi double job. Hal ini sesuai hasil wawancara berikut:

“...Pelayanan bpjs kita juga yang layani. Admin, administrasi toh saya, jadi saya tugasku melayani penjualan alkes, terus jadi admin juga, jadi asisten dokter juga sama asisten lab biasanya kalau swab-swab atau strip-strip saya yang lakukan...”(Ibu D, 22 Tahun, 19 Juli 2023).

Adanya keterbatasan tenaga pelaksana administrasi mengakibatkan terhambatnya proses administrasi di BNNP Sultra. Mengakibatkan terjadinya tugas rangkap/ double job dimana selain sebagai pelaksana administrasi, petugas tersebut juga melakukan tugas lain sehingga tidak dapat fokus dalam memberikan pelayanan administrasi dan menyelesaikan tugas administrasi lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes RI No. 28 tahun 2011 tentang Klinik yang menjelaskan bahwa jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan klinik(1).

3. Pelatihan

Pengembangan sumber daya manusia merupakan seperangkat aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terencana yang dengan sadar dirancang guna memberikan fasilitas kepada para pegawai didalam suatu perusahaan dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Suatu organisasi harus menyadari bahwa SDM merupakan modal dasar dalam proses pembangunan dan pengembangan serta kemajuan organisasi, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Salah satu upaya pengembangan SDM adalah dengan pelatihan (Trisanti, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Klinik Pratama Fonaselab dan BNNP Sultra, diketahui bahwa sudah dilakukan pelatihan kepada petugas administrasi mengenai pelaksanaan administrasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara berikut:

“...eee pelatihannya itu bersifat internal. Jadi kek kemarin pengarsipan dia bukan yang dapat sertifikat kayak di hotel apa, internalnya itu di aula. jadi dari pusat datang untuk pengarsipan kami di undang, tata naskah pembuatan surat, yah sekedar begitu dek, internal sifatnya tapi dari pusat...”(Ibu D, 30 Tahun, 14 Juli 2023).

Sedangkan di Klinik BNNP Sultra, pelatihan yang diadakan untuk karyawan dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

"...jadi begini dek, tidak ada pelatihan secara eksternal atau dari luar dek, hanya diadakan oleh kantor pusat. biasanya itu mereka undang masing-masing tenaga ahli di bidang itu untuk melatih karyawan yang ada di sini..." (PJ. Dr. R, 42 Tahun, 14 Juli 2023).

Pelaksanaan pelatihan kepada petugas administrasi di Klinik Fonaselab dan Klinik BNNP Sultra sudah dilakukan pelatihan dimana pelatihan tersebut dilakukan secara internal dengan mengundang pelatih dari pusat. Dengan adanya pelatihan tersebut, tenaga administrasi dapat melakukan tugasnya dengan baik karena mereka telah memiliki pengetahuan dan keterampilan penggunaan media computer yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan administrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa untuk mendukung tugas pokok tenaga administrasi maka dibutuhkan kemampuan tentang teknologi informasi khususnya penggunaan computer yang perkembangannya harus terus ditingkatkan seiring semakin pesatnya kemajuan teknologi (Harahap, 2020).

Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu upaya pengembangan SDM yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecakapan karyawan dimaksudkan sebagai setiap usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap karyawan sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. Oleh karena itu, organisasi perlu terus melakukan pengembangan SDM, karena investasi di dalam pengembangan SDM merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia (Trisanti, 2019).

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu output kegiatan atau pelayanan dari sebuah pelaksanaan administrasi. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas, Pelaporan adalah penyampaian data terpilah dari hasil pencatatan kepada pihak terkait sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan (Permenkes No 31, 2019). Laporan kunjungan, pengobatan dan lain-lain dilaporkan oleh klinik ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. dari klinik pratama Berikut hasil wawancara mengenai keluaran dalam pelaksanaan administrasi di Klinik Pratama Fonaselab dan Klinik BNNP Sultra:

"...jadi kalau cakupan kelengkapan laporan data pasien itu selalu lengkap ji, di kirim setiap bulan, biasa dikirimkan itu tanggal 1-10. Terus pelaporan data pasien itu ada dua, satu ke dinas kesehatan ada link tersendiri pelaporannya, kalau yang di bpjs, pelaporannya itu setiap kalau kita mau klaim non kapitasi..." (PJ. Dr. A, 40 Tahun, 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sejauh ini, cakupan kelengkapan pelaporan data kunjungan pasien di klinik pratama fonaselab dalam pelaksanaan administrasi di klinik telah berjalan dengan maksimal, belum terjadi kendala dalam pelaporan tersebut. Yang melakukan pelaporan setiap bulan yaitu PJ. Klinik Fonaselab di kedua institusi yang mengevaluasi, dilaporkan setiap bulan tanggal 1-10.

"...saya lihat sejauh ini cakupan kelengkapan pelaporan data pasien yang dikirimkan ke dinkes itu sudah berjalan dengan baik, kita itu kan kalau klinik di bnn itu dibawah bidang rehabilitasi semua itu sudah ditentukan dari pusat, mengenai jumlah klien yang harus kami terima tiap tahun kayak begitu sudah ketentuan dari pusat. Untuk tahun ini 2023 klien yang harus kami capai itu 110 orang, selain di klinik ini kan ada 3 macam yang dilayani salah satunya rehabilitasi klien narkoba, surat ket. Bebas narkoba, dan evaluasi psikologi..." (PJ. Dr. R, 42 Tahun, 14 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sejauh ini, cakupan kelengkapan pelaporan data kunjungan pasien di Klinik Pratama BNNP Sultra dalam pelaksanaan administrasi di Klinik telah berjalan dengan baik, Yang melakukan pelaporan setiap bulan yaitu admin ke dinkes, dilaporkan setiap bulan dikirimkan paling lambat tanggal 5 dan tidak terjadi kendala dalam cakupan pelaporan data pasien. Kelengkapan dan ketepatan adalah merupakan indikator mutu pelaporan suatu klinik. Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan pencatatan dan pelaporan terpadu di Unit Pelayanan Puskesmas dilakukan secara manual setiap tanggal 5 setiap bulan. Dalam proses Pelaporan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu

Puskesmas (SP2TP) merupakan bagian dari evaluasi proses. Penting karena adanya evaluasi akan didapatkan feedback dari program kerja yang telah dijalankan. Tanpa evaluasi akan menjadi untuk mengetahui sejauhmana tujuan yang telah dicapai (Mardini, Anwary dan Anggraeni, 2020).

SIMPULAN

1. Klinik pratama Fonaselab

Berdasarkan aspek sarana, ketersediaan SDM Kesehatan termasuk tenaga administrasi telah sesuai dengan Permenkes RI tentang klinik. Selain itu, tenaga administrasi juga telah mengikuti pelatihan internal mengenai proses administrasi di klinik tersebut. Namun, kendala yang ada yaitu ketersediaan prasarana berupa laptop/computer yang sangat berguna dalam proses pelaksanaan administrasi.

2. Klinik BNNP Sultra

Pada aspek sarana sudah sesuai dengan Permenkes RI tentang klinik. Tenaga administrasi juga telah mengikuti pelatihan. Namun dari aspek ketersediaan SDM secara umum Kesehatan dan non Kesehatan (tenaga administrasi) masih belum memadai. Dalam hal pelaporan ke Dinas Kesehatan tidak ada kendala. Kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

SARAN

1. Diharapkan pada Klinik Pratama Fonaselab dan Klinik Pratama BNNP Sultra agar melengkapi kebutuhan prasarana laptop/computer yang sangat penting dalam proses administrasi sehingga kegiatan administrasi tidak terhambat.
2. Pada Klinik BNNP diharapkan memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan dan non Kesehatan (tenaga administrasi) yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pelayanan klinik agar tidak ada tugas yang melakukan tugas rangkap dan masing-masing petugas bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 028 Tahun 2011 Tentang Klinik.
2. Yustiawan T. Manajemen Klinik Dalam Persiapan Kerjasama Dengan BPJS Kesehatan. *J Adm Kesehat Indones* [Internet]. 2013;1(1):208–16. Available From: https://www.academia.edu/10555649/Manajemen_Klinik_Dalam_Persiapan_Kerjasama_Dengan_Bpjs_Kesehatan_Clinic_Management_In_Term_Of_Preparing_Cooperation_With_Social_Health_Insurance_Provider
3. Sandy A. Analisis Efisiensi Klinik Pratama Rawat Inap Di Kabupaten Sragen. Naskah Publikasi. Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2020.
4. Mustofa A Dkk. Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat [Internet]. 2020. 53 P. Available From: [File:///D:/Rencana/Gabungan_Administrasi_Pelayanan_Kesehatan_Masyarakat_Revisi.Pdf](file:///D:/Rencana/Gabungan_Administrasi_Pelayanan_Kesehatan_Masyarakat_Revisi.Pdf)
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan. 2018;1–34.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.
7. Kementerian Kesehatan. Rencana Aksi Program Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015-2019. Kemenkes. Jakarta: Badan Ppsdm Kemenkes Ri; 2017. 55 P.
8. Trisanti, S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bidang Pelayanan Kesehatan. Malang: Penerbit Wineka Media; 2029
9. Harahap Wr. Profesi Arsiparis Sebagai Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Arsip Statis. *Pustaka Karya J Ilm Ilmu Perpust Dan Inf*. 2020;8(1):63.
10. Mardini H, Anwary Az, dan Anggraeni S. Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Di Puskesmas Tampa Kabupaten Barito Timur Tahun 2020. 2020; Available From: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3194/1/Artikel_Analisis_Sp2tp_Di_Puskesmas_Tampa_Kabupaten_Barito_Timur.Pdf#